



**LAPORAN KHUSUS**

PROGRAM KOTAKU DIGALAKKAN DI SLEMAN DAN KOTA YOGYA

## Kerja Keras demi Bebas Kawasan Kumuh

**KAWASAN** kumuh menjadi pekerjaan rumah yang panjang bagi pemerintah. Di Kota Yogya masih ada sekitar 174 hektare kawasan kumuh yang belum tertangani. Sedangkan Kabupaten Sleman memiliki kawasan kumuh seluas 162,93 hektar. Untuk mengejar target bebas kawasan kumuh di tahun 2019, pemerintah daerah dan pemerintah pusat bersama-sama menanggulangnya. Percepatan penanganan kawasan kumuh bakal dilakukan mulai akhir 2017.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono menyebut kawasan kumuh di Kota Yogyakarta yang belum terlayani mencapai 174,3 hektare. Jumlah itu sudah berkurang sekitar 90,51 hektare

*\* Bersambung ke halaman 9*

### Kerja Keras

dari jumlah kawasan kumuh yang ditetapkan dalam surat keputusan walikota nomor 216 tahun 2016 sebanyak 264,9 hektare.

"Tahun 2017 ini yang sudah tertangani 17,2 hektare kawasan kumuh. Itu belum ditambah penanganan melalui BDI (Bantuan Dana Investasi) Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang terupdate sampai Desember nanti," kata Agus kepada Merapi belum lama ini.

Sedang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman, kawasan kumuh tersebar di 45 titik yang berada di 17 desa terutama wilayah perbatasan antara perkotaan dengan pedesaan (aglomerasi). Wilayah ini pula yang akan menjadi prioritas penanganan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) hingga mencapai 0 persen pada tahun 2020.

Menurut Asisten Koordinator Mandiri Kotaku Sleman Raden Adhi Heryadi, kriteria kawasan kumuh mencakup beberapa aspek yaitu bangunan, prasarana jalan, air minum, drainase, persampahan, limbah, proteksi kebakaran dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Luas kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati Sleman No. 14.31/ Kep.KDH/A/2016 tersebut, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok menduduki peringkat pertama yakni 40,3 hektar, nomor dua Caturtunggal (Depok) 23,52 hektar dan posisi ke tiga Desa Tirtoadi (Mlati) seluas 15,71 hektar.

Untuk mencapai target 0 persen kawasan kumuh penanganan dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan

daerah sesuai kewenangan masing-masing. Agus menjelaskan pemerintah pusat menangani kawasan kumuh dengan luas di atas 15 hektare. Sedangkan pemerintah provinsi menangani kawasan kumuh 10 sampai 15 hektare dan pemerintah kota mengatasi kawasan kumuh di bawah 10 hektare.

Kawasan kumuh yang ada kini tersebar di 13 kecamatan di Kota Yogyakarta di antaranya di Kecamatan Wirobrajan, Gedongtengen, Gondomanan, Mergangsari, Umbulharjo, Pakualaman, Jetis dan Tegallirejo. Hanya Kecamatan Kraton yang masuk bebas kawasan kumuh.

Salah satu penanganan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program Kotaku adalah program pe-

nataan kawasan kumuh dengan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Agus menyatakan perkembangan program penanganan kumuh kini terlayani 34,17 persen. "Yang belum terlayani penanganan kawasan kumuh akan dilakukan percepatan di akhir 2017, tahun 2018 hingga tahun 2019. Harapannya target nol hektare kawasan kumuh bisa tercapai di 2019," paparnya.

Setiap kelurahan mendapatkan bantuan dana program Kotaku berkisar Rp 350 juta sampai Rp 500 juta sesuai proposal yang diajukan warga. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh warga melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tiap kelurahan.

Pada permukiman bantaran Sungai Code dengan konsep *riverside* pedestrian tepi sungai. Sedangkan permukiman



**Pembangunan talud dan pengerasan jalan menggunakan paving blok di Dusun Nologaten.**

Merapi-AwanTurseNO

Untuk Dianggapi

..... Sambungan halaman 1

di bantaran Sungai Winongo berkonsep *waterfront area* atau menjadikan sungai sebagai area depan permukiman. Untuk kawasan kumuh non bantaran dengan penguatan fungsi kawasan.

Menurutnya ada beberapa wilayah yang dinilai cukup berhasil dalam menata kawasan kumuh yakni di Kelurahan Karangwaru, Ngampilan, Gowongan, Suryatmajan dan Kelurahan Kepakaran. Meskipun telah berjalan, tapi diakuinya dalam pelaksanaan program Kotaku ada kendala. Namun sosialisai dan pendekatan terus diupayakan oleh para BKM di tiap kelurahan.

"Kendala pelaksanaan penanganan kumuh yakni kesiapan masyarakat di kawasan kumuh untuk ditata dan terkait kepemilikan lahan," ujar Agus

Untuk memantau perkembangan kawasan kumuh itu, Pemkot Yogyakarta juga mengembangkan sistem aplikasi *electronic slum upgrading report* atau e-SURe. Ditambahkan sistem itu mampu melihat penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan.

Sedang program Kotaku di Kabupaten Sleman dilakukan kolaborasi berbagai pihak. "Kita berkolaborasi antara lembaga Mandiri Kotaku, pemerintah desa, kabupaten, DIY maupun pusat. Sehingga dapat saling mendukung baik program pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat," ungkap Adhi di Posko Mandiri Kotaku, Gabungan, Pandowoharjo, Sleman belum lama ini.

Dijelaskan, prioritas pembangunan infrastruktur, sampai saat ini masih fokus pada perbaikan prasarana jalan, drainase dan talud sungai. (Tri/Awm/Nef)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005